



Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Petani Cengkih Di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una

Rifki Firmansyah^{1*}, Ellys Rachman¹, Andi Yusuf Katili¹

1. Universitas Bina Taruna Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Correspondence author: rizqitashelinayudia2727@gmail.com

Abstract. *Farmer empowerment should be understood as an effort to enhance the internal capacity of farmers while simultaneously expanding their access to productive resources and business opportunities that can improve their welfare. This research is a descriptive study utilizing a qualitative approach. The objective of this study is to obtain a clear overview of the inhibiting factors in the empowerment of clove farmers by village governments in Tojo Una-Una Regency. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The research focuses on the role of the village government, capital, and infrastructure. Based on the research findings regarding the role of the village government, it was found that the village government has performed its role appropriately; the government's role as a facilitator has been implemented well. However, obstacles remain, particularly in the execution of programs planned by the village government. Consequently, cooperation and coordination between the village government and the farming community are required to maximize the needs for collective progress. Regarding capital, the results indicate that the provision and supply of capital by the village government have not been well-implemented due to a lack of planning and limited village budgets. Furthermore, the procurement of infrastructure and facilities by the village government is considered suboptimal due to budget constraints. Increased attention to the procurement and maintenance of infrastructure is a key factor for the successful development of clove farming in various regions. The village government must optimize empowerment efforts, provide information regarding market prices, and conduct counseling and mentoring programs to improve farmer welfare. Providing capital assistance programs for farmers, such as People's Business Credit (KUR), is essential for agricultural productivity to grow and succeed. It is expected that the village government can provide optimal infrastructure to support all forms of agricultural activities so that farming income can be maximized.*

Keywords: *capital; clove farmers; empowerment; infrastructure; role of village government*

How to Cite:

Firmansyah, R., et al. (2025). Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Petani Cengkih Di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 142-151. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.2.2025.142-151>

1. Pendahuluan

Peran aparat pemerintah Desa dalam pelayanan dan pemerintahan sangat penting dalam mewujudkan Desa yang berkembang menuju Desa yang sejahtera karena semua sumber ekonomi berasal dari Desa. pendapatan masyarakat Desa banyak yang berasal dari sektor pertanian laut. Berdasarkan data dari ^(BPS)tahun 2024, masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. berjumlah 40.720.959. Bertani merupakan kegiatan yang menjadi profesi sehari-hari masyarakat dalam pedesaan. Dalam cakupan ini pertanian merupakan

salah satu sektor paling penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pertanian juga merupakan bagian vital yang paling penting bagi suatu desa.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Profesi sebagai petani masih banyak diminati, terutama oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan, karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan kondisi tanah yang subur. Namun, masih banyak petani di Indonesia yang belum mampu mengelola hasil pertaniannya secara optimal. Untuk itu dibutuhkan upaya dan peran dari Pemerintah Desa untuk membangun serta mengupayakan distribusi dan pengolahan sumber pertanian untuk peningkatan ekonomi petani. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pelaku pembangunan, yaitu dengan merancang dan melaksanakan program-program pembangunan desa yang selaras dengan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat setempat. (Kode Bora et al., 2023)

Sektor khususnya pertanian cengkih memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang banyak memiliki masyarakat yang profesi sehari-harinya adalah seseorang petani.

Cengkih merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang dapat tumbuh dengan baik di wilayah ini. Tanaman ini memiliki banyak manfaat, antara lain digunakan sebagai rempah untuk masakan pedas di Eropa dan sebagai bahan utama dalam produksi rokok kretek khas Indonesia. Selain itu, minyak cengkih dimanfaatkan dalam bidang aromaterapi serta pengobatan tradisional, khususnya untuk masalah gigi. Budidaya cengkih banyak dilakukan di Kepulauan Banda dan Madagaskar, serta juga berkembang di wilayah seperti Tasmania, India, dan Sri Lanka. Sebagai komoditas pertanian, cengkih memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian nasional, baik dalam skala usaha kecil maupun besar, karena perannya yang luas sebagai bumbu, bahan baku industri rokok, hingga obat-obatan.

Cengkih (*Syzygium aromaticum*) juga dikenal sebagai tanaman obat tradisional. Selain itu, cengkih merupakan sumber minyak atsiri yang penting untuk industri makanan, farmasi, dan pabrik rokok di Indonesia. Namun, kondisi pasar cengkih nasional berfluktuasi akibat perubahan harga yang signifikan serta tingginya biaya pemanenan dan pengolahan. Secara teknis, tanaman ini memiliki karakteristik panen yang tidak konsisten; tahun dengan hasil melimpah sering diikuti oleh tahun dengan hasil yang lebih sedikit. Harga cengkih biasanya turun saat musim panen tiba, menyebabkan kerugian bagi para petani dan berdampak negatif pada produksi. (Sardianti et al., 2023)

Upaya pemerintah Desa dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi petani menjadi kunci untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Berawal dari perubahan iklim yang mempengaruhi proses pematangan, harga jual yang kurang stabil dan sering berfluktuasi, serta kurangnya akses ke pemasaran yang menjadi isu besar daripada hambatan yang sering dialami para petani. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, pemerintah Desa dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi petani dan masyarakat Desa secara keseluruhan.

Pemberdayaan difokuskan pada sektor ekonomi, yang bersama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penggerak utama pembangunan. Keduanya saling mendukung dan

memperkuat pembangunan di sektor-sektor lainnya, yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, terpadu, dan seimbang. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, petani memegang peran penting sebagai penopang utama perekonomian di wilayah pedesaan. Meskipun memiliki peran vital dalam menyediakan pangan bagi masyarakat, kondisi kesejahteraan para petani sering kali masih jauh dari memadai. Dalam konteks ini, peran pemerintah Desa menjadi sangat penting. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memperkuat kapasitas petani agar dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran masyarakat. Proses ini juga mencakup pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki, yang dilakukan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan inti permasalahan serta kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Pemberdayaan petani perlu dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas petani dari dalam, sekaligus memperluas akses terhadap sumber daya produktif dan peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi elemen penting dalam proses ini. Masalah utama yang sering dihadapi petani, termasuk petani cengkih, adalah rendahnya pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, peran pemerintah, khususnya pemerintah desa, sangat dibutuhkan dalam mendukung pemberdayaan petani guna meningkatkan produktivitas secara lebih efektif dan efisien. (Lubis, 2020)

Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan, yakni dengan menetapkan arah dan langkah strategis guna menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan berbagai peraturan. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah desa juga menyediakan pedoman dasar bagi masyarakat yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kegiatan dalam proses pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah desa selaku pembuat kebijakan kurang mengupayakan kebijakan untuk kesejahteraan para petani cengkih.

Dalam (Muhammad Viki Nisfani) (Al Azis, 2022) ia mengemukakan bahwa Peran pemerintah desa sebagai Dinamisator berfungsi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ketika menghadapi kendala dalam proses pembangunan, dengan tujuan mendorong dan menjaga kelangsungan dinamika pembangunan desa. Pemerintah desa menjalankan peran ini melalui pembinaan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Suharto (2023) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengarahan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat petani. Upaya tersebut merupakan bagian dari kontribusi pemerintah desa untuk menjaga keberlangsungan dinamika lembaga-lembaga yang mampu memberikan pembinaan secara efektif kepada masyarakat. Demikian dalam hal ini juga pemerintah desa selaku pemberi layanan kepada masyarakat kurang mampu memberikan pengarahan guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani cengkih.

Pemerintah desa bertugas menciptakan lingkungan yang aman bagi proses pembangunan (menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan untuk memaksimalkan pembangunan daerah). Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya mengembangkan atau meningkatkan pertanian berkelanjutan termasuk praktik pertanian seperti memberikan bantuan modal atau pendanaan. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai fasilitator harus mampu memberikan bantuan dalam hal pengadaan koperasi ataupun kelompok tani guna mengorganisir para petani dalam hal pemberian bantuan dan pendanaan. (Firdaus, 2020)

Peran pemerintah desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa dan daerah yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Sebagai katalisator, pemerintah memegang peran krusial sebagai agen pembangunan dalam membentuk tatanan masyarakat, khususnya bagi para petani. Selain berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan tatanan kehidupan yang baik di berbagai aspek. Seperti halnya dalam memajukan perekonomian serta kesejahteraan para petani cengkih.

Namun dalam hal ini, peran yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terlebih lagi dalam persoalan pemberdayaan dalam menciptakan kesejahteraan, kemandirian, serta potensi alam yang digarap oleh petani.

Desa Dolong A merupakan Desa yang berada di Kepulauan Teluk Tomini Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-una, dimana penduduknya adalah mayoritas petani dan nelayan. Jumlah penduduk di desa Dolong A adalah 643 jiwa dengan 193 jumlah kepala rumah tangga yang ada. Pertanian merupakan sektor pendapatan penting di Desa Dolong A karena mayoritas penduduknya sehari-harinya bekerja sebagai petani dengan jumlah sekitar 89 buruh tani dan 82 petani sehingga kesehariannya mereka bergantung daripada hasil pertanian. Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para petani yakni harga pasaran dan penjualan hasil panen yang kurang menguntungkan. Hasil panen cengkih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani karena beberapa faktor yang diantaranya ada tiga faktor utama yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor alam.

Faktor internal seperti kurangnya keterampilan modern dalam budidaya cengkih, akses terbatas terhadap teknologi pertanian modern dan keterbatasan modal dan akses kredit. Faktor eksternalnya meliputi cuaca, harga beli cengkih yang menurun atau fluktuasi harga pasar, kebijakan yang kurang mendukung dan permainan harga oleh para tengkulak. Setiap tahunnya jika sudah memasuki masa panen, maka harga yang awalnya tinggi semakin menurun disebabkan permainan harga oleh para tengkulak. Masalah seperti ini yang kemudian dihadapi oleh para petani dalam menjual hasil panennya. Pemerintah Desa Dolong A seharusnya menyadari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat petani, seperti kendala dalam hal bibit, pupuk, pemasaran, perawatan, serta hasil panen yang kurang memuaskan. Kesadaran ini semestinya mendorong Pemerintah Desa untuk bergerak melakukan pemberdayaan dan memfasilitasi kebutuhan petani, mulai dari peningkatan kualitas bibit, penyediaan pupuk, hingga membantu proses penjualan. Dengan demikian, diharapkan hasil panen dapat meningkat dan petani memperoleh pendapatan yang lebih optimal, sekaligus menjaga kualitas panen di masa mendatang.

Dalam kerangka ini, proposal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai faktor-faktor penghambat pemberdayaan petani sehingga menghasilkan strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini akan membahas peran konkrit pemerintah Desa Dolong A dalam mendukung akses petani terhadap sumber daya, teknologi, pasar, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang pemberdayaan pemerintah Desa dalam konteks ini, diharapkan dapat diidentifikasi dan direkomendasikan solusi-solusi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga akan dibahas sebagai bagian dari strategi yang holistik dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan.

2. Konsep

Pemberdayaan petani cengkih merupakan fokus daripada pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai pelayanan masyarakat guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara sosial maupun ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan harus bersifat objektif dalam menjalankan Amanah yang diembannya. Dalam hal ini pemberdayaan petani cengkih dapat diharapkan sebagai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang pertanian.

Konsep Peran

Menurut Marcus, Peran merupakan aspek dinamis dari status, dan seseorang dikatakan menduduki suatu peran apabila ia melaksanakan hak dan tanggung jawab yang menyertai status tersebut. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya untuk memenuhi peran tersebut. (Al Azis, 2022)

Sedangkan Pandangan Robert tentang teori peran menekankan sifat individu sebagai aktor sosial yang belajar berperilaku sesuai dengan posisi yang mereka tempati dalam lingkungan kerja sosial.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan status individu seseorang yang apabila telah melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat. Dalam masyarakat yang luas tiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga apabila individu menjalankan kewajibannya yang telah diberikan artinya dia telah menjalankan peranannya. (Sunarni Sri, 2024)

Dari pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu harapan perilaku pada suatu posisi tertentu dan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang. tindakan yang dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam situasi tertentu. Peranan Dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk peran serta dan sumbangan pikiran terhadap sesuatu hal suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan.

Pemerintah Desa

Menurut R. MacIver dalam (Purba & Huda, 2022) Pemerintah dapat dipahami sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kewenangan, serta berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Bahkan, pemerintah juga dipandang sebagai perusahaan terbesar di antara semua bentuk organisasi manusia. Menurut Samuel E. Ward Finer, pemerintahan harus memiliki unsur-unsur penting, yakni adanya kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu dilaksanakan (state), pejabat yang menjalankan pemerintahan (the duty), serta cara, metode, dan sistem (manner, method, and system) yang digunakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan terhadap masyarakat. Tujuan utama pembentukan pemerintahan adalah untuk menciptakan sistem yang menjaga ketertiban, sehingga masyarakat dapat hidup secara layak. Pemerintah dibentuk bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi dan kreativitasnya demi tercapainya kemajuan Bersama. (Purba & Huda, 2022).

Sedangkan pengertian desa Secara etimologi desa berasal dari Bahasa sansekerta, yang berarti tanah kelahiran, kampung halaman atau tanah air. Desa merupakan satu wilayah yang terbentuk dari beberapa gabungan antara desas yang lain atau desa -desa kecil yang menyatu menjadi desa. Pembentukan desa juga berdasarkan sejarah dan adat istiadat di desa tersebut.

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa, yang juga dapat dikenal dengan istilah lain dan selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan beragam perspektif mulai dari R. MacIver dan Samuel E. Finer hingga landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah sebuah organisasi vital yang berfungsi sebagai "jantung" dan "otak" di tingkat paling dasar pemerintahan. Mereka bukan sekadar sekumpulan individu berwenang, melainkan sebuah entitas yang secara berkelanjutan mengatur dan mengelola seluruh aspek kehidupan masyarakat di wilayah desa. Peran fundamental Pemerintah Desa tidak terbatas pada administrasi semata; mereka adalah penjaga ketertiban, penyedia layanan esensial, dan fasilitator utama bagi pengembangan potensi individu dan kolektif. Dengan berlandaskan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat setempat, Pemerintah Desa berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi setiap warganya untuk berkreasi dan maju bersama. Singkatnya, Pemerintah Desa adalah aktor sentral dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, berdaya, dan mandiri, memastikan bahwa desa ini terus berkembang demi kemajuan bersama.

Indikator Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah merupakan sebuah kunci dalam melakukan pemberdayaan dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini kekuatan utama untuk melakukan perubahan-perubahan dalam peningkatan ekonomi. Pemerintah desa melaksanakan proses pembangunan disegala bidang terlebih pembangunan fisik dan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Menurut pandangan Ryaas Rasyid, dalam (suharto, 2024) peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 4 peran antara lain: (a) Peran pemerintah sebagai regulator, menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai pedoman untuk masyarakat untuk melakukan segala kegiatan. (b) Peran sebagai dinamisator, mengarahkan masyarakat untuk turut serta aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. (c) Peran pemerintah sebagai katalisator, memposisikan sebagai sebuah agen untuk percepatan perubahan dan pengembangan daerah sehingga menjadi modal sosial untuk meningkatkan partisipasi. (d) Peran pemerintah sebagai fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif untuk menyiapkan segala kebutuhan Pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk Peningkatan Keterampilan pendanaan dan pemodalan.

Pemberdayaan Petani Cengkih

Pemberdayaan adalah proses yang bertujuan memberikan kekuatan (*power*) kepada pihak yang kurang berdaya (*powerless*) sekaligus mengurangi kekuasaan (*disempowered*) dari pihak yang terlalu dominan (*powerfull*) agar tercipta keseimbangan. Menurut Rappaport, pemberdayaan juga merupakan metode yang memungkinkan individu, organisasi, dan komunitas untuk mengendalikan atau memiliki kuasa atas kehidupan mereka sendiri. (Margayaningsih, 2018)

Selanjutnya Sumodiningrat menambahkan tujuan dari pemberdayaan ini merujuk pada keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya saing, memiliki kapasitas pengetahuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik secara fisik, ekonomi, maupun secara sosial seperti kepercayaan diri, bisa

menyampaikan aspirasi juga mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya. Oleh karena itu dibutuhkan proses belajar untuk menambah pengetahuan dari waktu ke waktu. (Jesica Anggia Fahrezy & Fitri Eriyanti, 2024)

Pemberdayaan petani merupakan segala usaha yang bertujuan meningkatkan kemampuan petani dalam menjalankan usaha tani secara optimal melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem serta fasilitas pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, n.d.)

Pada dasarnya, pemberdayaan berfokus pada penguatan baik pada tingkat individu maupun sosial, dengan menitikberatkan pada kemampuan individu terutama kelompok yang rentan dan lemah agar mereka benar-benar memiliki kekuatan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.:

Pertama, Kebutuhan Dasar Masyarakat Masyarakat pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga mereka dapat menikmati kebebasan, tidak hanya dalam mengungkapkan pendapat, tetapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit.

Kedua, Akses ke Sumber Produktif Dengan adanya sumber daya produktif, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan.

Ketiga, Partisipasi dalam Pembangunan Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencakup upaya nyata untuk mengembangkan daerah pedesaan dengan tetap mempertahankan arti dan potensi untuk berkembang di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan dan kesadaran identitas diri mereka.

Menurut Soeharto, indikator pemberdayaan paling tidak memiliki 4 hal yaitu: (1) kegiatan yang terencana dan kolektif; (2) memperbaiki kehidupan masyarakat; (3) prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung; (4) dilakukan melalui program peningkatan kapasitas

3. Metode

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang sistematis untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial serta budaya secara mendalam. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, 2019). Bogdan dan Taylor, dalam (Waruwu, 2023) Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi terhadap fenomena sosial dan persoalan manusia. Penelitian ini juga dapat dipahami sebagai pendekatan untuk menggali makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, serta deskripsi suatu fenomena. Penelitian kualitatif bersifat terfokus dan menggunakan berbagai metode, bersifat alami dan menyeluruh, menitikberatkan pada kualitas, memakai berbagai pendekatan, dan disajikan secara naratif dalam konteks ilmiah.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan ini berfokus pada tiga hal yang menjadi faktor-faktor penghambat pemberdayaan petani yaitu, dalam melihat Peran pemerintah desa, Modal, dan Pengadaan sarana prasarana.

Peran Pemerintah Desa

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Raintung et al., 2021) Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya. Hal ini pemerintah desa sebagai Lembaga yang memiliki kedudukan di desa harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemberdayaan. Pemerintah desa sudah melakukan peranannya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini peran pemerintah desa sudah dijalankan dengan upaya yang maksimal namun seringkali terdapat hambatan-hambatan dalam proses melakukan pelayanan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani, melalui pengembangan usaha di sektor pertanian. Dalam hal ini penulis mendalami peran pemerintah desa sebagai fasilitator melalui program desa. Terbukti bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya dalam memfasilitasi segala kebutuhan petani cengkih (Tarigan et al., 2024) Namun demikian pemerintah belum optimal dalam memfasilitasi segala kebutuhan petani dalam hal pendampingan serta penyediaan fasilitas yang dibutuhkan seperti dalam hal pelaksanaan penyuluhan maupun pendampingan kepada petani cengkih. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terlaksana dengan baik namun terdapat kendala-kendala seperti pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa. Untuk itu dibutuhkan kerja sama dan kordinasi pemerintah desa dengan masyarakat petani untuk memaksimalkan segala kebutuhan untuk kemajuan bersama.

Pemberian Modal

Dalam konteks pertanian, modal diibaratkan darah dalam tubuh usaha tani. Ia menjadi elemen penting yang menggerakkan seluruh siklus produksi, mulai dari pembukaan lahan, pembelian bibit unggul, pupuk yang baik, pestisida, hingga alat-alat pertanian modern, serta pembiayaan operasional harian. Tanpa ketersediaan modal yang memadai petani akan kesulitan untuk mengembangkan usahanya bahkan sekadar untuk bertahan dari resiko musim tanam serta musim panen yang tidak menentu. Modal merupakan barang dan jasa yang bekerjasama dengan factor produksi lain seperti tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk. Contoh barang modal dalam bidang pertanian meliputi uang, tanah, pupuk, alat-alat tani dan sebagainya (Wahab Muhammad et al., 2023). Umumnya semakin besar jumlah dan kualitas modal yang dimiliki, semakin besar pula kontribusinya dalam meningkatkan hasil produksi. Permasalahan modal menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para petani. secara umum petani cengkih mengalami kesulitan dalam memperoleh modal awal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, penulis menyimpulkan bahwa pemberian dan penyediaan modal oleh pemerintah desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa. Untuk itu diharapkan adanya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengalokasikan Sebagian dari dana desa untuk bantuan permodalan para petani cengkih.

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sarana adalah alat atau perlengkapan yang digunakan langsung dalam kegiatan, sedangkan prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Keduanya sangat penting untuk keberhasilan aktivitas dalam berbagai bidang. (Jahra et al., 2025). Sarana prasarana juga berperan menunjang segala kebutuhan petani dengan memudahkan segala bentuk aktivitas usaha tani. Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas sangat penting bagi petani cengkih dalam menunjang seluruh proses budidaya hingga pasca panen. Persepsi yang timbul di masyarakat pun berbeda, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti pengadaan alat-alat pertanian modern sangat membantu mempermudah aktivitas pertanian. Peneliti menyimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana oleh pemerintah desa terbilang kurang optimal diakibatkan keterbatasan anggaran untuk pengadaannya. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang matang oleh pemerintah desa untuk melakukan evaluasi penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pertanian. perhatian lebih terhadap pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan usaha tani cengkih di berbagai daerah. Masyarakat menginginkan pengadaan alat-alat penunjang pertanian serta pembagiannya secara merata kepada seluruh petani cengkih.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait faktor-faktor penghambat pemberdayaan petani, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah desa telah menjalankan perannya dengan sebagaimana mestinya dan seringkali terdapat hambatan-hambatan dalam proses melakukan fasilitasi kebutuhan petani cengkih. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai fasilitator melalui program desa untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkih terbukti bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya dalam memfasilitasi segala kebutuhan petani cengkih. *Kedua*, Pemberian modal merupakan kendala utama yang dihadapi petani. pemberian dan penyediaan modal oleh pemerintah desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa. *Ketiga*, Pengadaan sarana dan prasarana oleh pemerintah desa dinilai kurang optimal karena keterbatasan anggaran serta perencanaan yang tidak efektif. Untuk itu masyarakat menginginkan pengadaan sarana dan prasarana serta pembagiannya yang merata kepada seluruh petani cengkih untuk mendukung usaha tani

Daftar Pustaka

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- BPS. (n.d.). *penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2024.html>
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Publik Administrasi*, 3(1), 32–40.
- Jahra, F., Raudah, S., Baihaqi, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). *Selatan Kabupaten Balangan*. 762–771.
- Jesica Anggia Fahrezy, & Fitri Eriyanti. (2024). Faktor Pendukung dan Penghambat Stakeholders Dalam Pemberdayaan Petani Asam Kandis di Nagari Salibutan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1779>

-
- Kode Bora, A., Kolo, A. E., Duan, M. A., Naihetis, K., & Rade, S. D. (2023). Sosialisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. *Community Development Journal*, 4(4), 8096–8100.
- Lubis, S. B. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. 2507(February), 1–9.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Purba, F. N., & Huda, M. M. S. (2022). Upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme). *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1, 138–149. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/download/466/447>
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Sardianti, A. L., Dunda, T., & Hidayah, W. (2023). Analisis Biaya Produksi Cengkeh Di Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. *Journal Of Agritech Science (JASc)*, 7(01), 103–110. <https://doi.org/10.30869/jasc.v7i01.1124>
- suharto, I. L. (2024). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2021. *Jurnal Sosio Dialektika*, 29, 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10995> Analisis
- Sunarni Sri. (2024). Peranan Kepala Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Publik. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2(2), 125–131.
- Tarigan, I., Sembiring, W. M., & Angelia, N. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v3i1.2203>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013.
- Wahab Muhammad, S., Sambas, S., & Wahab. (2023). Peranan Modal Dalam Pengembangan Pertanian. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(6), 954–963.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, Halaman 2896-2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>